

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan otonom daerah akan membawakan transformasi positif bagi Indonesia. Pemberlakuan sistem pemerintahan terpusat, yang semula dirancang untuk desentralisasi, berdampak positif bagi setiap daerah. Pemerintah daerah diberi kesempatan dan hak otonomi yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang. Kewenangan otonom yang diberikan kepada pemerintah daerah meliputi semua bidang pemerintahan kecuali pertahanan, keamanan, luar negeri, perbendaharaan dan pajak, peradilan dan agama. Sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi, tanggung jawab pemerintah negara meliputi penerimaan dan pengiriman dana, pengelolaan SDM serta pengelolaan infrastruktur penyelenggaraan negara. Selain desentralisasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dengan mengatur dan mengelola sumber daya ekonominya sendiri, pemerintah daerah juga memiliki landasan hukum untuk memperjelas sumber-sumber pendanaan daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi daerah. mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Sistem Manajemen Standar Akuntansi (SAP)

Di era globalisasi saat ini, implementasi tata kelola yang baik tidak dapat dinegosiasikan dan diterapkan sepenuhnya. Salah satu standar administrasi yang baik adalah tanggung jawab. Dalam arti bahwa warga negara tidak hanya memiliki akses terhadap kebijakan tetapi juga berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keefektifannya, keterbukaannya, dan transparansinya. Adapun dalam segala bentuk pergerakan bergantung pada hukum dan ketertiban yang berlaku secara wajar dan terpercaya serta kerja sama daerah dalam berbagai kegiatan daerah dan kemajuan daerah. Merupakan praktik normal di ruang publik negara untuk memiliki penilaian tidak layak dari badan pemeriksa yang paling penting (BPK RI) untuk ulasan pemerintah dan non-pemerintah. Khususnya di lingkungan pemerintahan daerah, para kepala daerah tampak terobsesi, saling berebut predikat opini WTP dalam laporan keuangan yang mereka hasilkan. Di sektor publik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pendapatnya atas laporan keuangan dari kementerian, serta mengaudit dan menyampaikan laporan keuangan dari pemerintah daerah. Pendapat atas hasil pemeriksaan BPK LKPD Buleleng dapat diberikan dalam bentuk “WTP”. Deklarasi ini merupakan dambaan semua instansi, baik pusat maupun daerah, karena dengan deklarasi tersebut masing-masing instansi memikul tanggung jawab

umum yang baik terhadap publik dan masyarakat. Dengan diterimanya rekening WTP maka kepercayaan terhadap laporan keuangan penyelenggara negara meningkat, keuntungannya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

Pendapat BPK terdiri dari empat jenis yaitu Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar (TW) dan Disclaimer. Hasil evaluasi auditor sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini, auditor mengeluarkan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), yang berarti bahwa hasil evaluasi telah mencapai atau mencapai tingkat konsistensi dan kewajaran yang dapat diterima sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Laporan keuangan yang baik memuat pernyataan WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Akuntan Publik Republik Indonesia (BPK) merupakan salah satu indikator kinerja yang memenuhi standar otoritas nasional dan menggambarkan keadaan, sehingga tunduk pada pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk birokrasi tanggung jawab yang baik (Nurabiah, 2018: 69- 70). Presiden Jokowi pada kemungkinan lain (Kompas, 2017 dalam artikel Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban) Ia lebih menekankan, perolehan pernyataan WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban pengguna dana masyarakat kepada instansi pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai dan

mempertahankan WTP merupakan ukuran efektivitas administrasi perpajakan pemerintah secara keseluruhan.

Tabel 1.1 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 – 2017

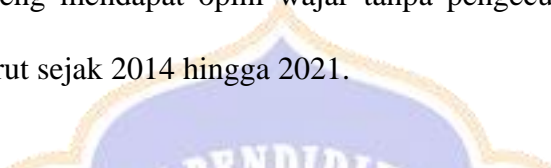
LKPD Kabupaten/Kota	Opini (Tahun)			
	2014	2015	2016	2017
Bangli	WDP	WDP	WTP	WTP
Karangasem	WDP	WDP	WTP	WTP
Klungkung	WDP	WTP	WTP	WTP
Badung	WTP	WTP	WTP	WTP
Tabanan	WTP	WTP	WTP	WTP
Jembrana	WTP	WTP	WTP	WTP
Gianyar	WTP	WTP	WTP	WTP
Denpasar	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK RI

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Opini BPK untuk ketiga Kabupaten yang ada di provinsi Bali pada tahun 2014 dan 2015 terdapat perolehan pendapat (Wajar Dengan Pengecualian) WDP. Hal tersebut dikarenakan Pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) adalah pernyataan asurans di mana mayoritas data pada laporan keuangan salah secara material, dengan pengecualian pos atau pos tertentu yang luar biasa. Auditor sering menggambarkan laporan keuangan WDP sebagai "cukup negatif" untuk menunjukkan ketidakkonsistenan dalam item tertentu, tetapi

ketidakkonsistenan tersebut mempengaruhi kelengkapan laporan keuangan secara keseluruhan (www.wikipedia.com).

Dalam menyusun laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Buleleng selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Usai audit, DPRD Kabupaten Buleleng mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama delapan tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2021.



Tabel 1.2. Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2021

No	LKPD (Tahun)	Opini
1	2014	WTP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP
7	2020	WTP
8	2021	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa Opini BPK untuk Kabupaten Buleleng serta Berdasarkan laporan keuangan Pemprov Buleleng terlihat bahwa setiap tabel mendapat banyak opini WTP. Hal ini tidak terlepas dari upaya, jerih payah dan dedikasi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Buleleng untuk Mematuhi hukum dan menyiapkan laporan keuangan yang bertanggung jawab menegakkan opini WTP selama delapan tahun.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian tentu Meski belum ada jaminan kesejahteraan, namun menjadi kebanggaan pemerintah kabupaten Buleleng. Setidaknya Kabupaten Buleleng adalah contoh bagaimana gelar tersebut bisa diraih. Keberhasilan pemerintah kabupaten Buleleng dalam meraih WTP tidak lepas dari usaha pemerintah daerah kabupaten Buleleng untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Alasan melakukan penelitian mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng salah satu daerah yang mendapatkan predikat tersebut. Dan tidak semua daerah bisa pemerintahan daerah bisa mendapatkan gelar tersebut.

Adapun alasan peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian ini adalah pertama karena sekitar bulan Agustus - September 2022 mahasiswa semester 7 S1 Akuntansi melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Kebetulan Praktek kerja lapangan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah oleh

peneliti. Selama proses peneliti ditugaskan di bidang akuntansi dan pelaporan, peneliti mengamati apa saja yang terjadi saat proses PKL terlaksana, salah satu fenomena yang terjadi yakni ternyata Laporan keuangan Pemkab Buleleng berpredikat opini 'Wajar Tanpa Pengecualian'. Ada alasan utama yang akhirnya peneliti tertarik mengambil judul penelitian bertema opini wajar tanpa pengecualian, yakni karena direkomendasikan langsung oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meneliti hal tersebut, awalnya peneliti belum tahu apa itu Wajar Tanpa Pengecualian, tetapi kepala bidang di BPKPD Buleleng menjelaskan dengan sangat jelas sehingga peneliti ada bayangan akan diapakan penelitian tersebut.

Alasan Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merekomendasikan karena Kabupaten Buleleng telah Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama delapan tahun berturut-turut, beliau ingin peneliti melakukan penelitian dengan topik tersebut. Gelar Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didapatkan karena Laporan keuangan tahunan perusahaan yang diaudit memberikan gambaran yang wajar tentang semua hal yang penting, termasuk kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas. Disini beliau ingin peneliti meneliti apakah ada faktor lain yang dapat menyebabkan gelar opini tersebut dapat bertahan hingga saat ini, karena tidak semua Kabupaten dapat mendapatkan gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa ada beberapa faktor yang dapat menopang predikat Perolehan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Buleleng. Laporan keuangan dapat dianggap tidak tepat karena kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh tindakan/kegiatan yang diwajibkan oleh hukum yang secara langsung dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan (Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007). Kepatuhan terhadap asas cara yang diketahui menemukan kewajiban auditor kepada memikirkan dampaknya terhadap tuntutan keuangan, terhitung kesemestaan pengungkapan. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan telah menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana dapat dilihat dari penelitian Sipahutar dan Khairani (2013), Atyanta (2011) dan Sunarsih (2013). Munawar (2016) menyimpulkan bahwa jumlah temuan pengendalian intern dan jumlah temuan kepatuhan berpengaruh terhadap opini keseluruhan dan parsial laporan keuangan pemerintah Buleleng. Safitri (2014), sebaliknya, menemukan bahwa kerentanan sistem pengendalian internal dan tingkat realisasi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapat, tetapi berdampak positif. Meskipun skor kepatuhan berdampak negatif pada ekspresi opini, ada hubungan dampak negatif.

BPKP tetap menyebut penyajian standar akuntansi pemerintah (SAP) yang tidak sesuai, kelemahan sistem pengendalian intern, dan perjanjian kepemilikan

negara/daerah sebagai faktor laporan keuangan pemerintah daerah tidak menerima laporan WTP. Kapasitas manusia yang tidak memadai untuk pengadaan barang dan jasa serta mengelola masalah keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi auditor dan pembuat opini, sistem pengendalian internal memberikan informasi penting dalam merencanakan pengujian khusus untuk menentukan kecenderungan dan luasnya salah saji dalam laporan keuangan (Hall and Tommie, 2007: 41). Oleh karena itu, ketika auditor menentukan bahwa tingkat pengendalian internal berada pada tingkat terendah dan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal organisasi, keadaan tersebut merupakan indikasi kemampuan auditor untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. pertimbangan harus menentukan tujuan. Bersamaan dengan mengirimkan komentar. Fakta bahwa auditor memperhitungkan kelemahan sistem pengendalian internal saat memberikan opini audit dibuktikan dengan Beberapa penelitian oleh Kawedar (2009), Sunarsih (2013) dan Lasena (2012), Sipahutar dan Khairani (2013). Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal atas penyajian laporan keuangan menyebabkan penyajian laporan keuangan yang buruk atau permintaan pendapat berupa pendapat wajar dengan pengecualian, tidak ada pendapat, atau pendapat negatif.

Akibatnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan pemerintah daerah tentang pelaporan keuangan kurang dipelajari dan minatnya terbatas. Oleh karena

itu peneliti tertarik untuk meneliti opini audit pemerintah kota atas laporan keuangan pemerintah kota dari BPK RI khususnya laporan keuangan pemerintah kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi opini mereka terhadap pelaporan keuangan kota di subjek penelitian yang lebih luas.

Dalam konteks faktor-faktor pencapaian predikat opini WTP pada pemerintah, fenomena faktor-faktor sudah dikaji dalam banyak literatur. Listiyani, Gunawan (2020) meneliti pengaruh kinerja sistem pengendalian intern dan penerapan personel terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil analisis menggabungkan bahwa praktik tertib resolusi intern secara parsial beruang lukisan dan berarti terhadap jenis pengabaran keuangan. Selanjutnya Bangsawan & Abbas (2021) juga mendapat Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum opini audit dapat terpengaruh secara material. Jadi dari hasil penelitian itu berhubungan dengan grand teori yang peneliti gunakan yakni teori kepatuhan maka penjelasannya, semakin patuh para pembuat laporan keuangan pemerintah kepada kepatuhan perundang-undangan, Mematuhi standar akuntansi dan sistem pengendalian internal menghasilkan hasil pelaporan keuangan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.

Namun demikian, beberapa penelitian memiliki hasil yang kontradiktif. Pada penelitian mereka Fitriana, Anugerah & Fitrios (2020), Mali (2019), dan Fatimah,

Sari & Rasuli (2014) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berdampak negatif terhadap opini LKPD. Banyaknya temuan BPK RI tentang kelemahan sistem pengendalian intern menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pernyataan WTP pada LKPD.

Dalam penelitian ini, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan memprioritaskan judul “Pengaruh Kepatuhan Perundang-Undangan, Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagian besar pemerintahan daerah belum mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian hal tersebut disebabkan tidak mengikuti peraturan yang ada seperti ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang tidak memadai, ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sejalan dengan permasalahan tersebut maka upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Buleleng sehingga mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun berturut - turut.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam membahas permasalahan diatas, penulis mempersempit permasalahan dan memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian.

1.4 Rumusan Masalah

Tersedia pula rumusan masalah yang penulis berikan, diantaranya:

1. Apakah kepatuhan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengarah kepada penjelasan rumusan masalah, karenanya mampu ditetapkan tujuan dari dilaksanakannya temuan ini yakni mengujiakan pengaruh:

1. Kepatuhan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah.

2. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah.
3. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan sokongan hisab peluasan asas khususnya bagian dalam kondisi akuntansi lingkungan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai praktik dan penerapan disiplin akademik yang digali dalam perkuliahan, memperluas pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan surat pernyataan jabatan lengkap di lingkungan pemerintah kabupaten Buleleng.

b. Bagi pemerintah daerah.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif berkaitan dengan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi perolehan sudut pandang yang tidak memihak dari administrasi daerah.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melayani sebagai sumber ilmiah untuk penyelidikan masa depan dan menawarkan wawasan tambahan faktor penentu yang mempengaruhi evaluasi opini wajar tanpa pengecualian dalam konteks pemerintah daerah.

d. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini berusaha untuk menawarkan informasi dan wawasan yang berharga kepada audiens dan pembaca yang lebih luas, sekaligus berfungsi sebagai referensi untuk berbagai perspektif.